



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 30/KEP/2016

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PUSAT

IKATAN PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA

PERIODE TAHUN 2015 – 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan serta guna menjunjung tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian pada Instansi Pusat maupun Instansi Daerah perlu dibentuk suatu organisasi profesi Analis Kepegawaian;
- b. bahwa Ikatan Profesi Analis Kepegawaian Republik Indonesia merupakan sarana dan modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka kebersamaan untuk mengabdikan pada bangsa dan negara melalui penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk duduk sebagai Pengurus Pusat Ikatan Profesi Analis Kepegawaian Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Profesi Analis Kepegawaian Republik Indonesia Periode Tahun 2015 – 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/14/M.PAN/6/2008;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Butir Kegiatan Jabatan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282).

Memperhatikan: Hasil musyawarah dan kesepakatan pejabat fungsional Analis Kepegawaian tanggal 19 Januari 2016 mengenai daftar nama Pengurus Pusat Ikatan Analis Kepegawaian Republik Indonesia (IPAKRI) Periode Tahun 2015-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan susunan Pengurus Pusat Ikatan Analis Kepegawaian Republik Indonesia (IPAKRI) Periode Tahun 2015-2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMAN HARIA WIBISANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 30/KEP/2016
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS PUSAT IKATAN PROFESI
ANALIS KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE TAHUN 2015-2018

SUSUNAN PENGURUS PUSAT IKATAN PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN
PERIODE TAHUN 2015-2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PENGURUS
1.	H. Jono, S.Sos, MM	Analisis Kepegawaian Madya	Ketua Umum
2.	Gunarta, S.AP	Analisis Kepegawaian Madya	Wakil Ketua Umum
3.	Sumadi	Analisis Kepegawaian Penyelia	Sekretaris I
4.	Budi Sayogyo, S.AP	Analisis Kepegawaian Penyelia	Sekretaris II
5.	Putu Artati, SE	Analisis Kepegawaian Muda	Bendahara I
6.	Winarti	Analisis Kepegawaian Penyelia	Bendahara II
7.	Dra. Rita Kardinasari, M.Si	Analisis Kepegawaian Madya	Ketua Bidang Pengembangan SDM dan Hubungan Organisasi
8.	Dra. Dewi Rahayu, M.Pd	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Bidang Pengembangan SDM dan Hubungan Organisasi
9.	Latif Wahyudin	Analisis Kepegawaian Pertama	Anggota Bidang Pengembangan SDM dan Hubungan Organisasi
10.	Nairi, S.Sos	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota Bidang Pengembangan SDM dan Hubungan Organisasi
11.	H. Herry Supriyanto, S.Pd	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Bidang Pengembangan SDM dan Hubungan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PENGURUS
12.	Prima Adi Surya, S.IP, M.PA	Analisis Kepegawaian Muda	Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi
13.	Ambar Yuliyati, S.ST, SE, M.Si	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi
14.	Meiti Ramadani, S.Si	Analisis Kepegawaian Pertama	Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi
15.	Mahdalena, S.Sos	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi
16.	Slamet Riadi, S.IP	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi
17.	Drs. Eddy Suharyadi, M.AP	Analisis Kepegawaian Muda	Ketua Bidang Bantuan Hukum dan Kesejahteraan
18.	Tri Harsoyo Putro, S.Pd	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota Bidang Bantuan Hukum dan Kesejahteraan
19.	Djanu Ismadi, SH	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Bidang Bantuan Hukum dan Kesejahteraan
20.	Lamtiur, SH	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota Bidang Bantuan Hukum dan Kesejahteraan
21.	Herman Prasetyo, S.Sos	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota Bidang Bantuan Hukum dan Kesejahteraan

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

SILVIA LARIA WIBISANA